EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA PERIODE 2015-2019

1st Windi Yuniara, 2nd Rimi Gusliana Mais
Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
STIE Indonesia
Jakarta, Indonesia
windiyuniara38@gmail.com; rimi_gusliana@stei.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui (1) bagaimana Efektivitas penerimaan retribusi daerah DKI Jakarta periode 2015-2019 (2) bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data target retribusi daerah tahun 2015-2019 dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2015-2019, dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015-2019. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas, dan analisis kontribusi.

Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2015-2019 masuk dalam kategori cukup efektif. (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 berkontribusi sangat kurang dan rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

Kata Kunci : ***Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi***

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "untuk memajukan kesejahteraan umum", sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit kawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerinttah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

DKI Jakarta adalah salah satu Provinsi yang masuk 10 besar dengan jumlah penduduk terbanyak di indonesia dan membuat jakarta menjadi pusat perekonomian. Hal tersebut mendorong pesatnya pembangunan gedung perkantoran, tempat tinggal pribadi, hotel, tempat makan dan tempat tempat lainnya yang berdampak pada retribusi izin mendirikan bangunan dan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

Namun di sisi lain, retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan juga masih sulit untuk dapat membantu PAD lantaran kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) masih menjadi pertanyaan. Salah satu contohnya, bangunan ruko konstruksi baja dua lantai di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat, mencantumkan IMB nya hanya satu lantai menggunakan banner berwarna kuning yang biasanya dipakai untuk menunjukkan IMB rumah tinggal.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif (Ravianto, 2014 : 11). Efektivitas Retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentse perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah (Puspitasari, 2014:46).

Menurut Ahira (2012 : 77) kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution,* yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Besar kontribusi ini dapat dicari dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Yuliasti dan Dewi, 2017)

Diharapkan dalam penelitian ini diperoleh bukti tentang hubungan antara Efektivitas penerimaan Retribusi daerah, Kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan pendapatas asli daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

2. Bagaimana Efektifitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019?
3. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Ersita dan Elim (2016) menunjukan hasil Efektivitas retribusi daerah Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik.Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,104 %.

Penelitian selanjutnya oleh Sartika (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah Kota Palembang tahun 2014-2018 tidak efektif dan hanya tahun 2015 dalam kondisi kurang efektif. Penyebab tidak efektivitasnya retribusi daerah yaitu disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Retribusi yang paling tidak efektif adalah retribusi retribusi penggantian cetak peta sebesar, retribusi penyediaan dan/atau kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah (izin galian), retribusi kekayaan daerah dan retribusi parkir.

Selanjutnya penelitian oleh Yoduke dan Ayem (2015) menemukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah2009, 2011, 2012, 2013, 2014, sangat efektif, dan pada 2010 efektif. Efisiensi Retribusi 2009-2014, seluruhnya melebihi 100% dan sangat tidak efektif. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2009 pada level ofless; Pada 2010, 2011, 2014 sedang; 2012 dan 2013 cukup baik. Kontribusi Retribusi 2009 pada tingkat yang sangat baik, kriteria 2010-2013 kurang, 2014 sangat kurang.

Penelitian selanjutnya oleh Wijoyo, *et al* (2019) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada daerah Kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian di atas membuktikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik secara simultan maupun parsial.

Hengyun Li. *et al* (2016) penelitian yang dilakukan di Cina ini mendukung klaim bahwa pariwisata dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan daerah di Cina. menunjukkan pariwisata itu berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, studi ini juga memberikan bukti bahwa pariwisata domestik dapat mempercepat peningkatan pendapaan daerah dan pertumbuhan ekonominya lebih cepat dari pariwisata internasional. Mengingat bahwa sektor pariwisata dapat dengan cepat dikembangkan investasi yang lebih sedikit dan modal manusia yang lebih rendah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan pembangunan timur daerah, dapat diharapkan bahwa pengembangan pariwisata akan mempercepat 'pertumbuhan ekonomi wilayah barat dengan dukungan kebijakan pemerintah.

Penelitian oleh Zeynep, *et al* (2018) hasil estimasi kuadrat terkecil dua tahap memberikan bukti yang menonjol pada efek positif dari *deforestasi* dan pendapatan daerah di Turki. Hubungan timbal balik yang signifikan secara statistik juga dapat terjadi terlihat untuk kepadatan populasi pedesaan; Namun, itu hilang ketika pedesaan pertumbuhan populasi dan faktor pertumbuhan pendapatan diperiksa dalam hal yang sama model. Seperti Turki, sangat penting untuk menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau untuk mencegahkerusakan lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersamaan waktu.

Paolo Di Caro (2017) telah mendokumentasikan bahwa kesenjangan pendapatan daerah relevan antara dan dalam empat wilayah NUTS-1 Italia. Selain itu, bukti pendukung telah telah disediakan pada gagasan bahwa profil gender dan usia memainkan peran penting untuk memahami perbedaan ketimpangan pendapaan daerah di seluruh Italia. Analisis eksplorasi, lebih lanjut,menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti preferensi individu tentang ketidaksetaraan dan kualitas daerah institusi dapat berguna untuk menjelaskan perbedaan spasial dalam pendapatan daerah di seluruh wilayah Italia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang- Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata *autos dan namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berati aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

222 Pendapatan Asli Daerah

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

223 Retribusi Daerah

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Windhu (2018: 185) restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017:108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.2.3.1 Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Usaha

224 Efektivitas

Menurut Ravianto (2014 : 11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

2.2.4.1 Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (Yuliasti dan Dewi, 2017). Efektifitas retribusi daerah bisa dikatakan efektif ketika hasil akhir perhitungan sudah menginjak angka presentase di 80% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006).

225 Kontribusi

Menurut Ahira (2012 : 77) kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.

2.2.5.1 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD

Kontribusi retribusi daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD. dan retribusi daerah sudah bisa dikatakan berkontribusi terhadap peningkatan pendaptan asli daerah ketika hasil akhir perhitungan mencapai persentase diatas 40% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). jika hasil akhir sudah memenuhi kriteris tersebut baru bisa dikatakan kontribusi berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Alur Penelitian

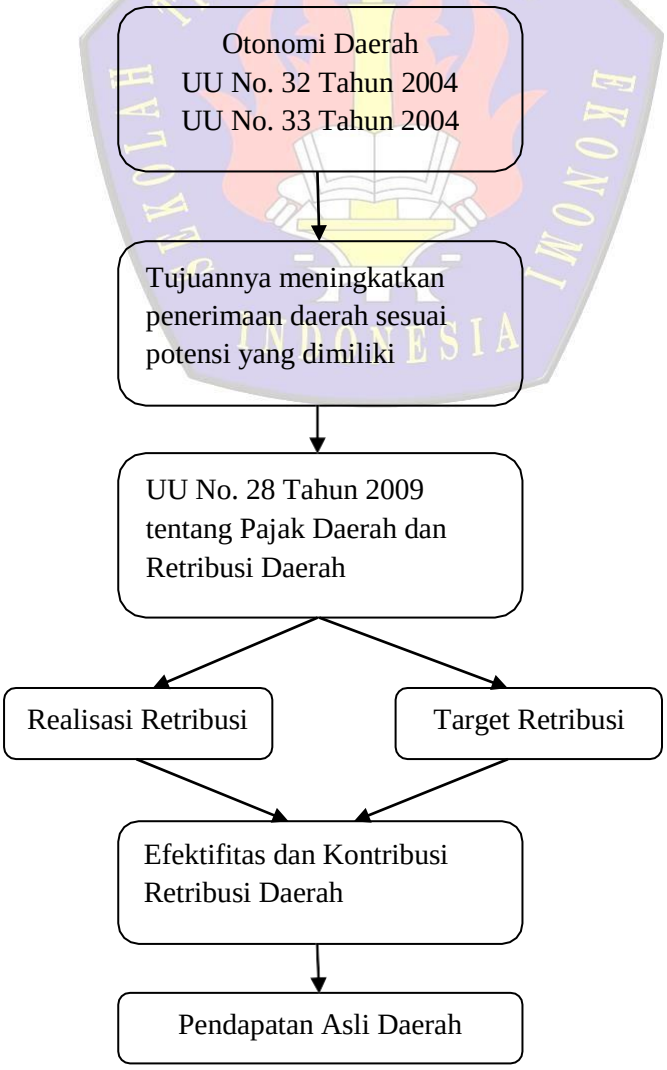

3. METODA PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Strategi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu studi mengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Menurut Sugiyono (2018 : 213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta yang berada di JL. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat. Waktu penelitian yang direncanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Juni 2020 s/d Agustus 2020. penelitian direncanakan akan terjadwal dan wawancara dengan responden (Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan dan Pengolah Data Retribusi). Mengenai efektif dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Alasan memilih objek penelitian pada BPRD adalah karena BPRD adalah instansi yang menangani atau mengelola data khusus pajak dan retribusi daerah.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Secara umum populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 – 2019.

3.3.2 Sampel

Sampel pada Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kota DKI Jakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan Laporan mengenai Realisasi terhadap Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Kota DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 – 2019.

3.4 Metoda Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang lebih menekan pada makna. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Sugiyono, 2018 : 213). Data yang terkumpul berupa data kualitatif seperti hasil wawancara, dokumentasi dan juga data pendapatan retribusi berupa angka.

3.5 Metoda Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda analisis deskriptif Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif. Dan juga menggunakan perhitungan dasar yang digunakan untuk menghitung efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dan kontribusi pemungutan retribusi di DKI Jakarta Periode 2015-2019. Berikut analisis data yang digunkan dalam penelitian ini :

a. Metode Analisis Deskriptif

b. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD

c. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

d. Metode Wawancara

e. Metode Observasi

f. Metode Dokumentasi

4. Hasil Penelitian

4.1 Profil BPRD

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pajak daerah dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pajak dan Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

4.2 Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Tabel 4. Perhitungn Efektivitas Retribusi Daerah DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	*Kriteria*
2015	610.000.000.000	459.459.498.063	75,32	Kurang efektif
2016	649.175.000.000	675.475.066.072	104,05	Sangat Efektif
2017	680.152.300.000	624.137.343.759	91,76	Efektif
2018	671.490.000.000	578.555.603.994	86,16	Cukup Efektif
2019	710.131.000.000	587.535.570.632	82,74	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berdasarkan tabel 4. diatas, menunjukan bahwa penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta sangat bervariasi, dilihat dari perolehan realisasinya yang tidak pernah mencapai target. Hanya pada tahun 2016 saja efektivitasnya encapai 104,05. Akan tetapi hasil akhir menunjukan efektivitas penerimaan retribusi daerah mendapatkan hasil sebesar 88,08 dan masuk dalam kriteria yang cukup efektif.

Selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan (Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta) dan juga dengan Pengolah Data Retribusi, peneliti menanyakan mengapa penerimaan retribusi daerah masih belum maksimal mesikupun masih dalam kategori yang cukup efektif, kurangnya minat masyarakat dalam membuat perizinan menjadi salah satu faktor kurang efektifnya penerimaan retribusi daerah, dan juga dikarenakanadanya relaksasi retribusi daerah oleh pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu hal yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan retribusi daerah sehingga membuat penerimaan retribusi daerah menjadi kurang efektif walaupun pada hasil perhitungan dalam tabel 4. menunjukan hasil yang masuk dalam kategori cukup efektif.

4.3 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

Tabel 4. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi	PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	459.459.498.063	33.686.176.815.708	1,37	Kurang efektif
2016	675.475.066.072	36.888.127.587.716	1,83	Sangat Efektif
2017	624.137.343.759	43.901.488.807.743	1,42	Efektif
2018	578.555.603.994	43.327.136.602.811	1,34	Cukup Efektif
2019	587.353.570.632	45.707.400.003.802	1,29	Cukup Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Dilihat dari tabel bahwa presentasi kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah selama lima tahun berturut turut tidak mencapai 10%, walaupun pada kenyataannya penerimaan daerah dari retribusi seiap tahunnya lebih mengalami peningkatan hanya saja padaahun 2018 mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah, begitu juga dengan PAD yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Hal diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan (Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta) dan juga dengan Pengolah Data Retribusi, peneliti bertanya tentang bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di DKI Jakara, beliau menyatakan bahwa, kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatnya penerimaan retrbusi dearah memang meningkatkan pula pendapatan asli daerah akan tetapi belum bisa dikatakan berkontribusi dengan baik, karena retribusi daerah bisa dikatakan berkontribusi dengan baik jika hasil perhitungan mencapai 40 persen (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). Sedangkan pada perhitungan yang peneliti dapat di tabel 4.3 hasil presentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD tidak pernah mencapai 10 persen, ini menunjukan pemerintah dalam 5 tahun bertutur turut belum bisa memaksimalkan peran retribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan hasil wawancara dengan pejabat yang bekerja di Badan Pajak dan Retrbusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengenai efektifitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2015-2018. Peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan dan Pengolah Data Retribusi yang menyatakan bahwa :

1. Efektivitas penerimaan retribusi daerah di DKI Jakarta diatas 100 persen, sehingga dinyatakan sangat efektif. tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada ahun 2016 dengan memperoleh 104,05 persen. sedangkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan memperoleh 82,74 persen.

2. Kontribusi penerimaan retribusi daerah di DKI jakarta diatas hanya mencapai 1,43 persen, sehingga dinyatakan sangat kurang. tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,29 persen, sedangkan tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan memperoleh 1,83 persen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, diharapkan pemerintah DKI Jakarta dalam pemungutan retribusi daerah dalam menjalan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan prosedur dan kerjasama pegawai yang saling berkaitan. adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan retribus daerah yaitu melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan daerah.
2. Dapat mempertahankan kemampuan dalam menjaga efektifitas penerimaan retribusi daerah dan juga dalam menyelesaikan setap pekerjaan dan kewajiban dengan baik.
3. Dapat meningkatkan kemampuan penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian ini sesuai dengan prosedur ilmiah.Namun peneliti masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Kurangnya informasi yang dimiliki peneliti mengenai prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan surat izin riset dari satu instansi untuk isntansi lainnya.
2. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui proses wawancara yang dilakukan secara online melalui karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan secara langsung, peneliti mendapatkan jawaban yang kurang lengkap dan menyebabkan terbatasnya kesimpulan yang bisa di ambil oleh peneliti.
3. Sulitnya mencari responden lebih dari dua, karena pada instansi pemerintah masih masing pejabat ditugaskan hanya terfokus pada satu bidang, sehingga hanya bisa mendapatkan satu respondeh di satu instansi.

DAFTAR REFERENSI

Ahira, A. 2012. *Terminologi Kosa Kata. Jakarta* : Bumi Aksara

Arfani,M.2019. *DKI Genjot PAD, di Jakarta Pusat Retribusi IMB malah Bermasalah.* Diakses tanggal 25 Agustus 2020. https://pontas.id/2019/11/07/dki-genjot-pad-di-jakarta-pusat-retribusi-imb-malah-bermasalah/

Caro, P.D. 2017. The Contribution Of Tax Statistics For Analysing Regional Income Disparities In Italy. *Journal of Income Distribution*, 26 (1), 1-27.

Databoks. 2018. *Berapa Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta*?. diakses tanggal 16 Desember 2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-pendapatan-asli-daerah-dki-jakarta

Elburz Z, Kemal M.C, and Peter N. 2018. The Mutual Relationship Between Regional Income And Deforestation: A Study On Turkey. *Journal Of The Faculty of Architectur*, 2, vol.35, 77-87.

Ersita, M and I.Elim. 2016 . Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol 4, No 1 , 889-897.

Hengyun Li. et al. 2016. Tourism and regional income inequality: Evidence from China. *Annalisis of Tourism Research*, 58, 81-99.

Mentayani, Ida, et al. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7 No. 1

Nugraha, P.L. 2018**.** *Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Periode 2013-2017).* Tugas akhir, Fakultas Ekonomi/Akuntasi Universitas Kristen Maranatha

Puspitasari, E.R.A. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Kabupaten Blora Tahun 2009- 2013.* Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi Universitas Diponegoro.

Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah.* Jakarta : PT> Raja Grafindo Persada

Putri, I.M. 2016. *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2009-2014.* Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publi.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Usman, R. 2017. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015). *Journal Of Accounting And Finance*,1,1,1- 17.

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014 (diakses tanggal 21 Agustus 2020 sebagai referensi)

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 . http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/26.pdf (diakses tanggal 21 Agustus 2020 sebagai referensi)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hukumonline.comhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ (diakses tanggal 2 November 2019 sebagai referensi Undang-undang).

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hukumonline.comhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ (diakses tanggal 2 November 2019 sebagai referensi Undang-undang).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hukumonline.comhttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ (diakses tanggal 2 November 2019 sebagai referensi Undang-undang).

Warsito. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : Semesta Media